

# Evaluasi Perjalanan Program TPID dan Ekspektasi Program Kerja 2018 di Sumatera dan Bali-Nusa Tenggara

**Prof. Dr. Bustanul Arifin**

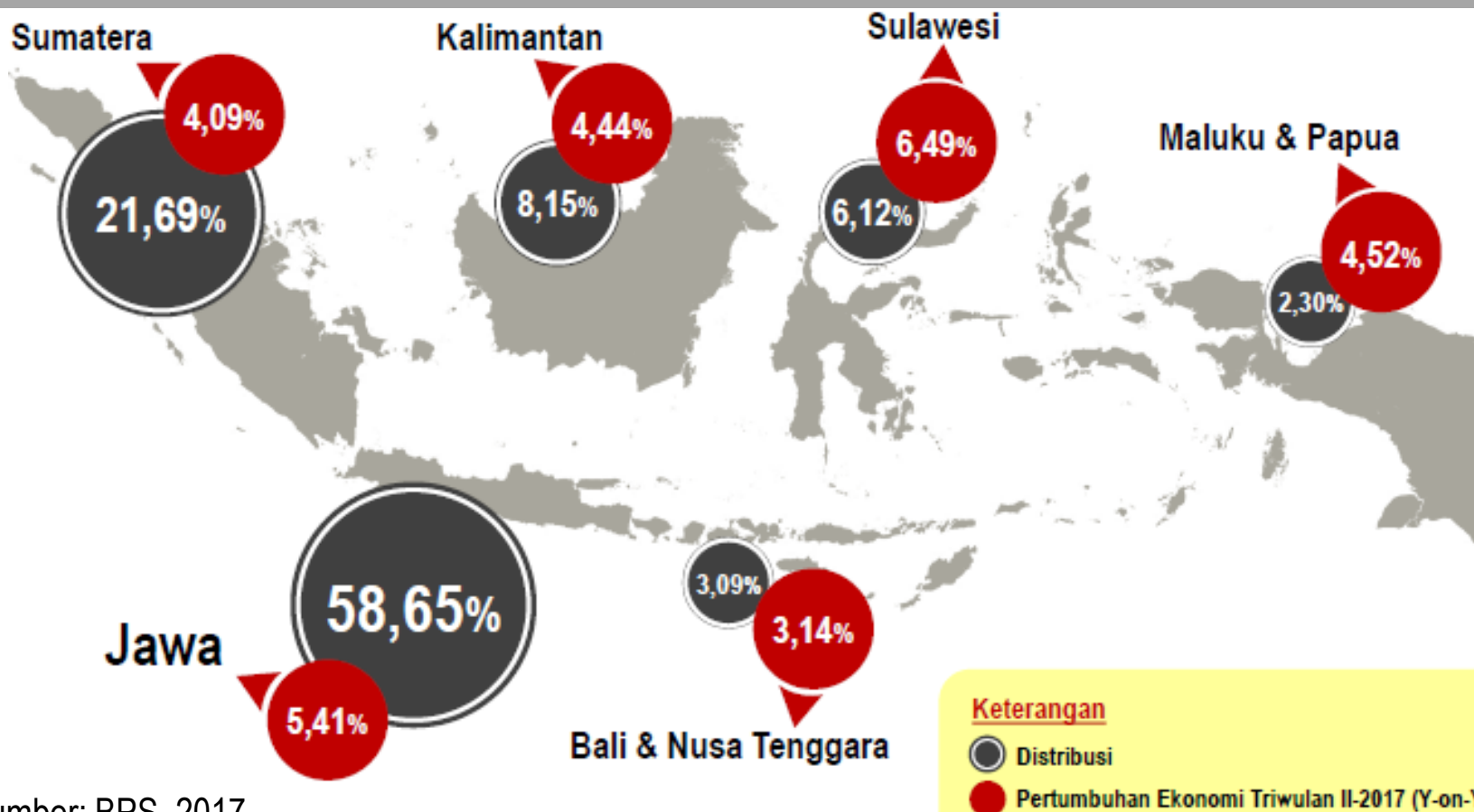
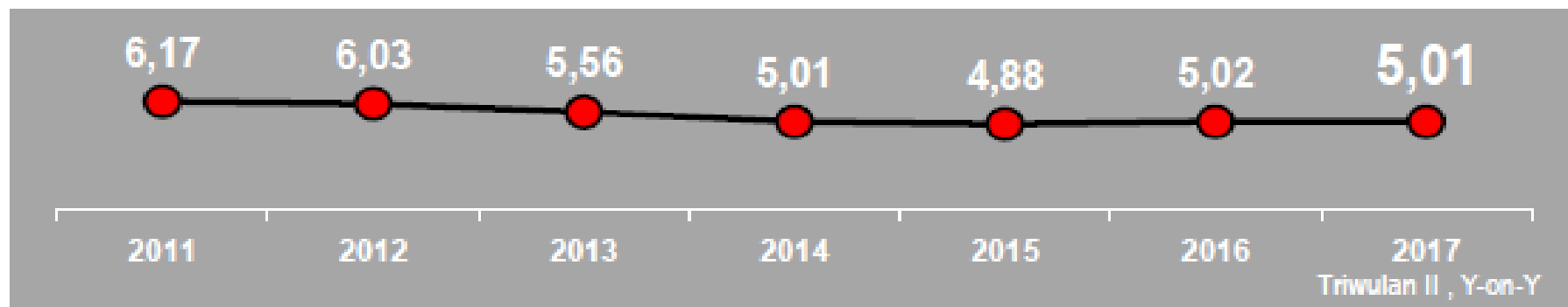
*barifin@uwalumni.com*

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA  
Dewan Komisiner dan Ekonom Senior INDEF  
Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan

# Outline Penyajian

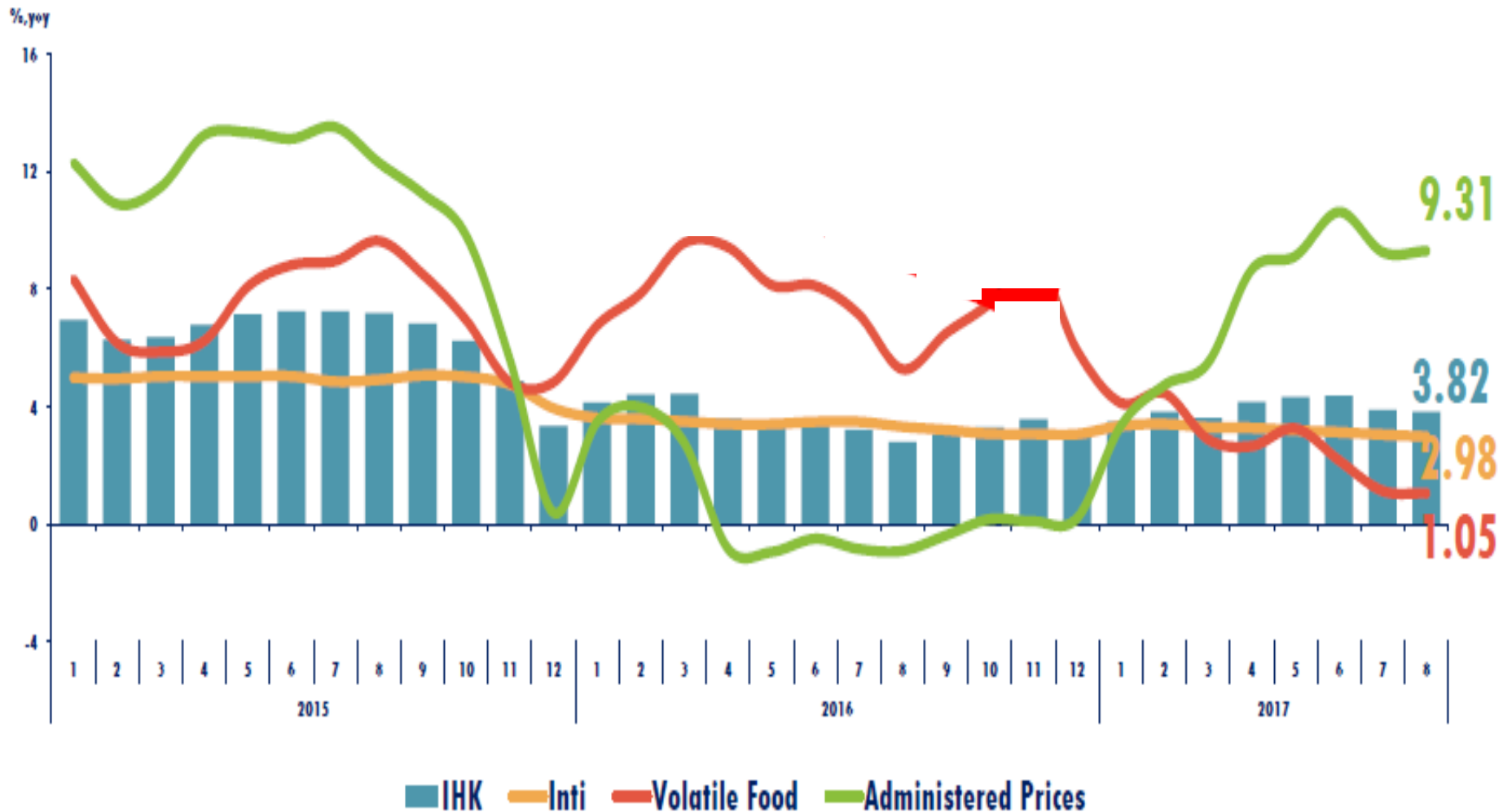
1. Laju Inflasi terkendali, tapi inflasi pangan bervariasi
2. Program konkrit TPID di Sumatera dan Bali-Nusra
3. Arahkan Presiden pada Rakornas TPID 2017
  - APBD penguatan infrastruktur & pengendalian harga pangan
  - Penguatan pertanian melalui sistem agribisnis
  - Perbaiki tata niaga dan distribusi pangan di daerah
  - Pengawasan distribusi-perdagangan pangan di daerah
4. Catatan Penutup: Rekomendasi Kebijakan

# Kinerja Pertumbuhan dan Distribusi Ekonomi



# Laju Inflasi Terkendali. Harga Pangan Stabil

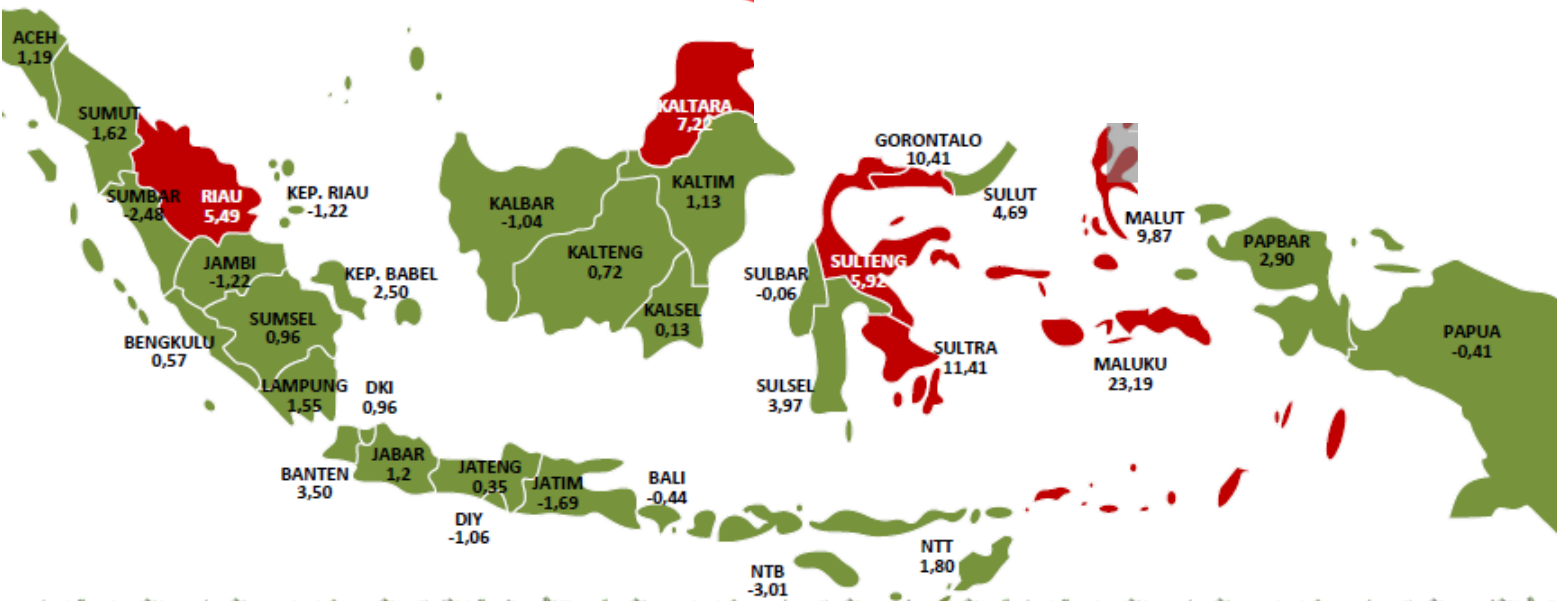
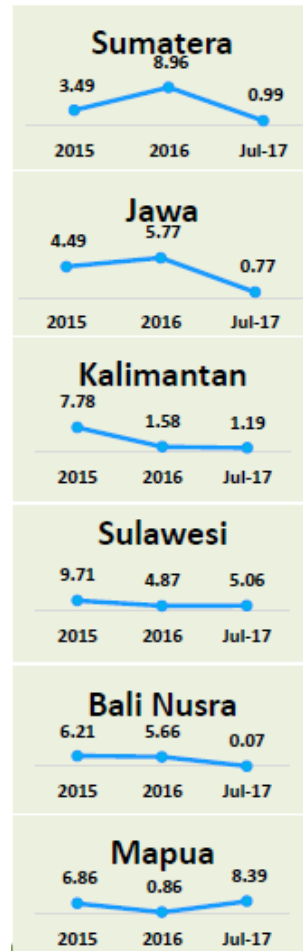
Inflasi administrasi harga (Program Pemerintah) tidak terkendali: Tarif listrik, harga gas, dll



Sumber: Dikompilasi BI, dari data BPS

# Inflasi Pangan di beberapa daerah juga terkendali

- Laju inflasi karena volatilitas harga pangan masih tinggi, karena bukan sentra produksi pangan strategis (pemicu inflasi), seperti di Provinsi Maluku (23.18%), Sulawesi Tenggara (11,41%), Gorontalo (10.41%), Maluku Utara (9,8%) dan lain-lain
- Koordinasi kewilayahan prioritas 2018. Laju inflasi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara cukup konsisten. Tapi Sulawesi dan Maluku-Papua perlu perhatian khusus dan ekstra.



# Program Konkrit TPID Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

Provinsi	Program Terobosan	Ekspektasi Penurunan Inflasi	Point of Success	Bentuk Koordinasi
<b>Aceh</b> (daging ayam ras, beras, cumi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan cold storage</li> <li>• Toko tani indonesia keliling</li> </ul>	Total: 0.38% VF: 0.83%	Anggaran yang memadai untuk listrik cold storage	Pengelolaan kilang (penggilingan) beras oleh BUMN sebagai <i>role model</i>
<b>Sumatera Utara</b> (cabai merah, beras, bawang merah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendirian BUMD pangan</li> <li>• Pasar induk provinsi dan pembenahan pasar daerah</li> <li>• Penguatan Toko Tani</li> <li>• Peran para penyuluh</li> <li>• Perencanaan tanam dan kalender tanam terintegrasi</li> <li>• Kerjasama dgn distributor besar komoditas pangan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama dengan pedagang besar</li> <li>• Pembentukan BUMD pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data surplus defisit nasional</li> <li>• Kebijakan impor bahan Pangan</li> <li>• Penurunan harga gas industri</li> </ul>

# Program Konkrit TPID Provinsi Sumatera Barat dan Riau

Provinsi	Program Terobosan	Ekspektasi Penurunan Inflasi	Poin of Success	Bentuk Koordinasi
<b>Sumbar</b> (daging ayam ras, beras, bawang merah)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sejuta polybag cabai</li><li>• Gerakan Menanam Cabai di kalangan aparatur sipil</li><li>• Kerjasama antar daerah (Jawa Tengah)</li><li>• Penambahan luas tanam bawang merah di Alahan Panjang (sentra produksi)</li><li>•</li></ul>	Total: 0.21% VF: 1.40%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistem <i>buffer capacity</i> komoditas hortikultura telah berjalan baik</li><li>• Tarif angkutan udara tidak ditetapkan ke arah batas atas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revitalisasi pasar dan pengembangan pasar induk</li><li>• Koordinasi dengan pihak maskapai untuk menambah armada dan frekuensi penerbangan</li></ul>
<b>Riau</b> (cabai merah, daging ayam ras, bawang merah)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gerakan Tanam Cabai Merah di pekarangan</li><li>• Monitoring stok intensif</li><li>• Optimalisasi Toko Tani dan e-warung</li><li>• Pasar induk di Pekanbaru</li><li>• Klaster pembibitan sapi Brahman X di Kab Siak</li></ul>	Total: 0.50% VF: 0.96%	Sinergi program TPID Provinsi dan TPID Kab/Kota	

# Program Konkrit TPID Provinsi Kepulauan Riau dan Bali

Provinsi	Program Terobosan	Ekspektasi Penurunan Inflasi	Point of Success	Bentuk Koordinasi
<b>KEPRI</b> (beras, bayam, cabai merah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan lahan pertanian di pulau-pulau sebagai sentra pertanian</li> <li>• Program penanaman 1 pohon cabai 1 pegawai</li> <li>• Memperluas jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) untuk menjual dan mendistribusikan beras</li> </ul>	Total: 0.35% VF: 0.25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama antara Provinsi Kepri dan Prov Jambi, Kota Tanjungpinang dan Kab Kulonprogo,</li> <li>• Lahan pertanian telah berproduksi</li> <li>• Tarif listrik akan dilakukan saat bulan mengalami deflasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dgn Kementerian Perhubungan agar memperkecil tarif bawah dan atas transportasi udara.</li> <li>• Rekomendasi pada pemerintah untuk menaikkan tarif listrik nanti.</li> </ul>
Bali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan luas tanam</li> <li>• Gerakan karang kitri dan rumah pangan Lestari</li> <li>• Subsidi dan bantuan bibit cabai kepada petani</li> <li>• Urban farming &amp; susun neraca bahan pangan</li> </ul>	Total: 4.68% VF: 4.68%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar murah dan Operasi Pasar</li> <li>• Dukungan Pusat transfer ke daerah untuk stabilisasi harga pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama antardaerah</li> <li>• Pengembangan pasar lelang komoditas,</li> </ul>



# Program Konkrit TPID Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung

Provinsi	Program Terobosan	Ekspektasi Penurunan Inflasi	Point of Success	Bentuk Koordinasi
<b>Sumsel</b> (bawang merah, bawang putih, minyak goreng)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edukasi cabai kering kepada masyarakat</li> <li>Klaster bawang merah di Kab Musi Rawas</li> <li>Pengembangan koperasi peternak ayam</li> <li>Operasi pasar periode Ramadhan dan Lebaran</li> </ul>	Total: 0.21% VF: 0.20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbentuk koperasi masyarakat perunggasan</li> <li>Shifting perilaku masyarakat dalam penggunaan cabai merah kering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian kuota operasi pasar beras, daging sapi, bawang merah, dan cabai merah dari Bulog Pusat ke daerah</li> <li>Koordinasi dengan Hiswana Migas untuk mengatur distribusi LPG 3kg</li> </ul>
<b>Lampung</b> (bawang merah, beras, bawang putih)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi penanaman cabai di rumah tangga</li> <li>Pembagian bibit cabai rawit merah ke masyarakat kota Bandar Lampung</li> </ul>	Total: 0.19% VF: 0.68%	Kerja sama dengan TPID kabupaten/kota di seluruh Lampung meningkat	

# Program Konkrit TPID Provinsi Bengkulu dan Bangka-Belitung

Provinsi	Program Terobosan	Ekspektasi Penurunan Inflasi	Point of Success	Bentuk Koordinasi
<b>Bengkulu</b> (daging, bawang merah, bawang putih)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan substitusi daging ayam kampung dan daging itik talang benih</li> <li>• Pembinaan petani cabai dan melakukan pendistribusian melalui Toko Tani Indonesia</li> </ul>	Total: 0.20% VF: 0.20%	Kerja sama dengan Bulog dan instansi dalam TPID dalam pelaksanaan oprasi pasar terutama menjelang hari raya keagamaan	Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (1) ketentuan batas atas dan bawah angkutan udara; (2) ketersediaan armada angkutan udara pada saat <i>peak season</i> .
<b>BABEL</b> (beras, bawang merah, jeruk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi Toko Tani Tempat Pelelangan Ikan</li> <li>• Inisiasi kerjasama perdagangan distributor antar daerah</li> <li>• Inisiasi pembentukan Gerai Nelayan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian mendukung ketersediaan pangan</li> <li>• Kerjasama perdagangan pangan antar daerah</li> <li>• Toko Tani dan Tempat Pelelangan Ikan berfungsi baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan pengendalian tarif angkutan udara</li> <li>• Pemerintah Pusat untuk anggaran program TPID</li> </ul>

# Arahan Presiden pada Rakornas TPID 2017

1. Optimalkan APBD untuk penguatan infrastruktur dan pengendalian harga pangan
2. Penguatan pertanian melalui sistem agribisnis
3. Perbaiki tata niaga dan distribusi pangan di daerah
4. Pengawasan distribusi-perdagangan pangan di daerah

# 1. Belanja APBD: Infrastruktur & Pengendalian Harga

- Permendagri 33/2017: Pemerintah Daerah men-sinergikan penganggaran program dan kegiatan penyusunan APBD 2018 dengan nasional, seperti pengendalian inflasi daerah.
- Arahan Presiden: Belanja produktif mendorong ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan
- Fokus belanja APBD misalnya untuk kegiatan berikut:
  - Infrastruktur pertanian
  - Infrastruktur logistik dan distribusi komoditas
  - Insentif bagi petani, sertifikasi lahan pertanian
  - Pasar murah dan operasi pasar saat terjadi gejolak harga pangan
  - Kerja sama perdagangan dengan daerah lain
- Sistem informasi pangan, sejenis PIHPS, untuk mendukung kredibilitas dan koordinasi respon kebijakan yang akurat.

## 2. Penguatan Pertanian melalui **Sistem Agribisnis**

- Sistem agribisnis: suatu rangkaian kesatuan sub-sistem faktor produksi di hulu, produksi dan perdagangan di tengah, panen-pascapanen di hilir dan sub-sistem pendukung lain;
- Faktor produksi: lahan, pupuk, benih, pestisida, tenaga kerja, pendidikan dan keterampilan petani, dll;
- Produksi: budidaya, praktik pertanian baik (GAP), pola tanam dan pergiliran tanaman, pertanian presisi, dukungan IT dll;
- Distribusi dan Perdagangan: logistik, transportasi, pelaku, penentuan harga, struktur pasar, margin tataniaga dll;
- Panen-Pascapanen: teknologi, hilang-susut, pengolahan, nilai tambah, standarisasi, sertifikasi, keterlacakan dll,
- Pendukung: kebijakan makro, stabilisasi moneter, perbankan, penyuluhan, promosi, investasi, model bisnis, dll

# Model Bisnis: Perbaikan Korporatisasi Pertanian

- Orientasi produksi saja tidak cukup, tapi perlu lebih beroperasi perbaikan kesejahteraan petani, manajemen usahatani, pola tanam berkelanjutan, panen-pascapanen;
- Model bisnis melibatkan integrator yang menyatukan pengelolaan lahan pertanian yang terfragmentasi ke dalam suatu manajemen usaha skala agribisnis modern;
- Peran integrator atau petani entrepreneur menyatukan talenta dan potensi: petani, pekerja, agronomis, peneliti, pendamping, penyuluh, industriawan, perusahaan jasa alat pertanian dan logistik, pemilik dana, dan peritel;
- Integrator memfasilitasi adopsi teknologi di lapangan, menyediakan input dan modal kerja bagi petani;
- Singkatnya, model ini mensyaratkan integrator yang menyediakan solusi, *create values*, dan mengambil risiko.

# Sekuensi: Pendampingan Petani, Penguatan Kelembagaan Petani, Kewirausahaan Petani

*Pendampingan dilakukan dgn sinergi & koordinasi K/L: Penyuluh Pertanian (Kemtan), Pemda, BI & Swasta*

## Kelompok Petani

- Dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya)
- Non-formal/tidak berbadan hukum

- Sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi

## Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan)

- Unit-unit usaha otonom, a.l. unit penyedia SAPRODI, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, dan unit simpan pinjam
- Non-formal/tidak berbadan hukum

- Merespon peluang pasar dan meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha

## Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

- Bergerak dari kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir. Unit produksi berkembang mjd Klmpk Usaha Bersama
- Berbadan hukum/tdk berbadan hukum

- Meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha

## Badan Usaha Milik Petani (BUMP)

- Berbadan hukum, dapat berupa: Koperasi atau Perseroan Terbatas
- BUMP tidak terbatas usahatani tanaman pangan, tetapi juga BUMP Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Pengrajin, dan juga UMKM

- Mensinergikan kegiatan bisnis & pemberdayaan petani secara korporasi
- Berorientasi keuntungan & mendorong kemandirian petani
- Meningkatkan posisi tawar petani saat mengadakan kemitraan

Dasar Pembentukan

Fungsi

### 3. **Tataniaga** dan **Distribusi Pangan di Daerah**

- Langkah pertama, identifikasi karakter sistem tataniaga dan distribusi pangan strategis di daerah, setiap daerah memiliki sistem tataniaga dan pola pergerakan harga yang khas dan unik;
- Perhatikan kinerja produksi, pemasukan pangan dari daerah lain, dan keseimbangan *supply & demand* produk pangan tersebut;
- Lakukan analisis struktur pasar, struktur industrinya, kenali pelaku tataniaga dan keseluruhan sistem rantai nilai yang terbentuk
- Perdalam sistem informasi harga, pembentukan harga, karakter modal sosial dan pola hubungan antarpelaku tataniaga berikut resiliensi sistem tataniaga terhadap gangguan faktor eksternal;
- Perbaikan tataniaga dan distribusi pangan di daerah tidak dapat dilakukan hanya dengan satu pendekatan saja. Solusi perbaikan tataniaga perlu spesifik komoditas, spesifik lokasi, jelas dan rinci.



## 4. Pengawasan Distribusi-Perdagangan di Daerah

- Pemerintah Daerah melakukan registrasi ulang pedagang komoditas pangan strategis, Permendag No 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
- Ujian lapang pertama dari pengawasan distribusi dan perdagangan pangan ini adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras, seperti diatur dalam Permendag No: 57/M-DAG/PER/8/1997
- Referensi Filipina (Price Control Republic Act No. 7581):
  - bagi pihak yang melakukan manipulasi harga: kurungan 5-15 tahun dan denda PHP 5.000-PHP2.000.000.
  - bagi pihak yang melanggar price ceiling: kurungan 1-10 tahun dan denda PHP5.000-PHP1.000.000.
- Referensi Malaysia (Price Control and Anti Profitering Act 723/2011)
  - Berlaku harga/margin maksimal pada waktu tertentu (HKBN)
  - Perubahan *cost structure* berpotensi mengubah harga jual, wajib dilapor
  - Intervensi dilakukan setiap saat degan mendirikan Kedai Satu Malaysia

# Potensi Dampak Negatif Pengawasan Eksesif

- Aturan main, kepastian kebijakan dan keteraturan implementasi kebijakan merupakan kondisi ideal dalam stabilitasi harga dan pengendalian inflasi;
- Pengawasan perjalanan kebijakan diperlukan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan ekonomi;
- Akan tetapi, pengawasan ekksesif dari penegak hukum dapat mengarah pada iklim usaha tidak konsudusif;
- Kepastian usaha yang rendah justeru dapat mengurangi aktivitas investasi dan bisnis secara umum, yang amat berpegaruh pada kinerja perekonomian nasional;

# Perkiraan Dampak HET Beras (Sawit, 2017)

- Penyerapan gabah lesu pada musim panen raya. Penggilingan padi produsen beras akan mengurangi daya serap gabah. Perbedaan harga beras antarmusim dan antartempat **tidak menarik lagi** bagi mereka.
- Sanggupkah Bulog mengambil alih sebagian peran swasta untuk menyerap tambahan gabah tersebut? Jika Bulog tidak mampu, maka harga GKP akan jatuh. Jika Bulog mampu menyerap, siapa yang harus menanggung potensi kerugian karena penurunan kualitas dan susut?
- Jika harga GKP ditekan sampai Rp 3.700/kg, penggilingan padi atau produsen beras dan pedagang beras medium dan asalan masih dapat beroperasi karena ada insentif HET Rp 9.450/kg. Tapi, petani akan protes (terutama di wilayah defisit padi), karena biaya produksi gabah lebih tinggi karena produktivitas rendah.
- Jika harga GKP tidak dapat ditekan dan tetap tinggi Rp 4.700/kg atau lebih, maka petani tentu merasa terbantu, tapi penggilingan padi atau produsen beras dan pelaku usaha akan merugi. Ancaman serius bagi industri perberasan, selain karena inefisiensi secara struktural.

# Catatan Penutup: Rekomendasi Kebijakan

- Penguatan TPID amat dibutuhkan untuk stabilitas harga dan pengendalian inflasi, terutama karena pangan volatil;
- TPID perlu bersinergi dengan satgas pangan, sinergi pembinaan dan penegakan hukum, kunci penting bagi stabilitas harga dan iklim usaha yang kondusif di daerah;
- Perbaiki sistem insentif berbasis inovasi teknologi, bukan subsidi, untuk peningkatan efisiensi produksi. Kemitraan ABGC (academics, business, government and civil society)
- Korporisasi pertanian memerlukan bisnis agregator yang tangguh dengan suatu tahapan pengembangan tingkat kebijakan yang sistematis, tidak berkembang secara sporadis;
- Studi mendalam masih dibutuhkan untuk mengantisipasi perubahan perilaku konsumen: Antisipasi sofistikasi rantai nilai pangan di tingkat global, sertifikasi & keterlacakan asal, dsb;